



Foto: Dok. ANTARA

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Tata Kelola, Keadilan Sosial, dan Krisis Demokrasi



Oktober 2025

infid.org



Analisis Ringkas INFID #3

REFLEKSI SATU TAHUN
PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN:
TATA KELOLA, KEADILAN SOSIAL,
DAN KRISIS DEMOKRASI

Penulis:

INFID, Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan, dan Migrant CARE.

infid.org

Tulisan ini adalah bagian dari upaya advokasi **#CloseTheGap** untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia. Advokasi ini dituangkan melalui narasi-narasi kritis berbasis bukti mengenai isu ketimpangan di Indonesia. Harapannya, kajian singkat ini bisa berguna sebagai bahan kampanye, pemahaman bersama, atau poin-poin diskusi di antara staf INFID, anggota, dan jaringan.

Tulisan ini **boleh dikutip** dalam riset atau dokumen lainnya.

PENDAHULUAN

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka telah menjadi momen evaluasi penting bagi arah demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial di Indonesia. Pemerintahan ini mengambil alih kekuasaan dengan janji besar mengenai keberlanjutan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta penguatan reformasi politik dan hukum sebagaimana termaktub dalam visi Asta Cita. Namun, catatan kritis dari berbagai lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa perjalanan satu tahun terakhir justru memperlihatkan kemunduran signifikan dalam prinsip tata kelola yang baik, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan lingkungan hidup.



Keterangan: Kabinet Merah Putih. (Foto: Antara)

Laporan ini dirangkum dari catatan "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" yang disusun oleh INFID dan organisasi-organisasi anggotanya, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan, dan Migrant CARE. Ketiga organisasi ini melakukan refleksi kolektif mengenai arah kebijakan pemerintah. Dokumen ini mengkonsolidasikan temuan dan analisis dari lembaga-lembaga tersebut, beserta komentar INFID terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Metodologi refleksi ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan menelaah kecenderungan kebijakan dan dampak sosial-ekonomi-lingkungan dari keputusan strategis pemerintah selama satu tahun terakhir. Fokus analisis meliputi tiga ranah: (1) tata kelola dan demokrasi, (2) keadilan sosial dan ekonomi, serta (3) krisis lingkungan dan pangan.

I. Tata Kelola dan Demokrasi

1. Politik Patronase dan Kronisme

Salah satu temuan paling mencolok dalam laporan ICW adalah kuatnya praktik politik patronase dan kronisme di lingkungan pemerintahan Prabowo–Gibran. Komposisi kabinet yang berjumlah 48 kementerian dan 56 wakil menteri menjadikannya kabinet paling gemuk sepanjang era reformasi, dengan indikasi kuat praktik bagi-bagi kekuasaan di antara partai pendukung dan kelompok relawan politik.

ICW mencatat bahwa pengangkatan sejumlah pejabat dengan rekam jejak kasus korupsi menunjukkan lemahnya komitmen terhadap integritas dan reformasi birokrasi. Bahkan, keberadaan pejabat aktif dari militer dan kepolisian di jabatan sipil memperlihatkan kecenderungan politik patronase yang melanggar prinsip supremasi sipil. Kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer hanya menjadi puncak gunung es dari tata kelola yang tidak transparan.

Sementara itu, praktik rangkap jabatan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga publik mengaburkan batas profesionalisme dan membuka ruang konflik kepentingan. Fenomena ini menunjukkan bahwa visi Asta Cita tentang pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi hanya berhenti pada slogan politik.

2. Militerisasi Ruang Sipil dan Kemunduran Supremasi Sipil

Laporan WALHI dan YLBHI menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran memperluas keterlibatan militer dalam tata kelola sipil. Revisi Undang-Undang TNI (2025) memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa pengawasan sipil yang memadai, sehingga membuka jalan bagi militer untuk masuk ke sektor-sektor nonpertahanan seperti kehutanan, pangan, dan proyek strategis nasional.

WALHI menilai, kebijakan tersebut merupakan bentuk “kembali dwifungsi TNI” melalui legitimasi hukum baru. Misalnya, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan memungkinkan militer terlibat langsung dalam penguasaan kembali kawasan hutan, yang dalam praktiknya dapat berujung pada pengusiran masyarakat adat dari wilayah yang berkonflik.

Di sisi lain, YLBHI menemukan bahwa pembahasan revisi UU TNI dan RKUHAP dilakukan secara tertutup di hotel tanpa partisipasi publik, yang menandakan kembalinya pola pengambilan keputusan otoritarian dan tertutup. Akibatnya, mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif semakin lemah.

3. Resentralisasi dan Krisis Demokrasi Lokal

Catatan INFID atas RAPBN 2026 menunjukkan bahwa pemerintahan ini melakukan resentralisasi fiskal yang ekstrem. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan mencapai 80–87 persen, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 7–12 persen. Akibatnya, ruang fiskal daerah hampir nihil, sehingga pemerintah daerah kehilangan kemampuan untuk memenuhi janji politik dan kebutuhan dasar masyarakat.

Resentralisasi ini disertai dengan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp 50,59 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi Rp 693 triliun pada 2026. Dampaknya terasa langsung di daerah-daerah, di mana pemerintah lokal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara ekstrem, bahkan hingga 1.000 persen di beberapa daerah seperti Cirebon dan Jombang.

Selain memperdalam ketimpangan fiskal, resentralisasi juga mengikis prinsip otonomi daerah yang menjadi pilar reformasi politik 1998. Pemerintah pusat semakin mengontrol arah pembangunan tanpa memperhatikan konteks lokal dan partisipasi masyarakat.

4. Otoritarianisme dan Pembungkaman Sipil

Refleksi YLBHI menunjukkan peningkatan drastis represi terhadap kebebasan sipil. Demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 yang menolak kenaikan PBB dan kebijakan ekonomi sentralistik berujung pada penangkapan 5.444 orang dan 997 warga dijadikan tersangka, menjadikannya gelombang kriminalisasi terbesar pasca-reformasi.

Narasi resmi pemerintah yang menyebut demonstrasi tersebut sebagai upaya “makar” memperlihatkan pola klasik pembungkaman oposisi dengan retorika keamanan nasional. Kolaborasi antara militer dan kepolisian dalam menangani aksi sipil memperdalam karakter militeristik pemerintahan.



II. Keadilan Sosial dan Ekonomi

1. Kebijakan Anggaran, Utang, dan Pajak

INFID mencatat bahwa Pemerintah Prabowo–Gibran menghadapi utang negara sebesar Rp 1.353 triliun pada 2025, dengan kecenderungan peningkatan signifikan untuk membiayai proyek-proyek ambisius seperti Danantara dan MBG.

Pendapatan negara masih didominasi oleh pajak (85–90 persen), namun dengan rasio pajak rendah (10–11 persen). Alih-alih memperluas basis pajak progresif, pemerintah justru menambah objek pajak baru yang membebani kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mendanai program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan orientasi jangka pendek yang mengabaikan investasi sosial jangka panjang. Program MBG menyerap hingga Rp 335 triliun dalam APBN 2026, dengan 71,7 persen dana berasal dari anggaran pendidikan pusat.

Kebijakan fiskal semacam ini memperlihatkan pola populisme fiskal—menggunakan program populis besar untuk mempertahankan legitimasi politik sambil menekan layanan publik yang esensial.

2. Eksploitasi Pekerja Migran

Refleksi dari Migrant CARE menunjukkan bahwa kondisi pekerja migran Indonesia semakin memburuk di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran. Kebijakan negara yang menitikberatkan pada remitan menyebabkan pekerja migran diperlakukan sebagai “sapi perahan devisa,” bukan warga negara yang memiliki hak atas perlindungan sosial dan hukum.

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri terus meningkat tanpa perbaikan perlindungan di negara tujuan, sementara skema penempatan masih dikuasai oleh agen swasta. Migrant CARE juga mencatat lemahnya pengawasan atas remitansi dan maraknya pungutan tidak resmi di daerah asal, yang memperdalam eksploitasi pekerja perempuan migran di sektor domestik.

3. Keadilan Gender dan Perempuan dalam Krisis Pangan

Solidaritas Perempuan menyoroti bagaimana kebijakan pangan dan agraria di bawah pemerintahan ini semakin menjauh dari prinsip keadilan gender. Program food estate dan MBG memperkuat kontrol negara dan korporasi atas sumber-sumber agraria, sementara perempuan—yang selama ini menjadi pelaku utama produksi dan pengelolaan pangan keluarga—semakin tersingkir (Solidaritas Perempuan, 2025).

Kebijakan pangan berbasis industri skala besar tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan pengetahuan lokal perempuan atas benih, lahan, dan pangan lokal. Akibatnya, perempuan petani kehilangan akses terhadap tanah dan sumber pangan, serta menjadi buruh musiman dalam proyek-proyek korporasi.

Solidaritas Perempuan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan yang berkeadilan gender, di mana perempuan memiliki kendali atas sumber daya dan keputusan produksi pangan. Pemerintahan Prabowo–Gibran, sebaliknya, memperkuat maskulinisasi sektor agraria melalui militerisasi dan korporatisasi.

III. Krisis Lingkungan dan Pangan

1. Ekspansi Ekstraktivisme dan Hilangnya Kedaulatan Alam

Laporan WALHI menggambarkan pemerintahan Prabowo–Gibran sebagai kelanjutan dari paradigma ekonomi ekstraktif. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen mendorong ekspansi industri berbasis eksploitasi sumber daya alam—mulai dari hilirisasi mineral, proyek kehutanan, hingga perluasan food estate.

Pendekatan ini mengabaikan daya dukung lingkungan dan mempercepat deforestasi serta krisis iklim. Proyek food estate di Merauke, misalnya, membuka dua juta hektar hutan adat dan menggusur masyarakat Malind serta komunitas adat lainnya. Kebijakan ini bukan hanya menghilangkan identitas budaya masyarakat adat, tetapi juga memperburuk emisi karbon hingga ratusan juta ton CO₂ per tahun.

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Politik Populis

Program MBG dijadikan ikon pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak dan ketahanan pangan. Namun, berbagai temuan menunjukkan penyimpangan serius. ICW mencatat bahwa lebih dari 11.000 anak mengalami keracunan akibat distribusi makanan yang tidak higienis, sementara YLBHI menemukan bahwa 70 persen tenaga pelaksana MBG adalah anggota TNI, Polri, atau kader partai politik.

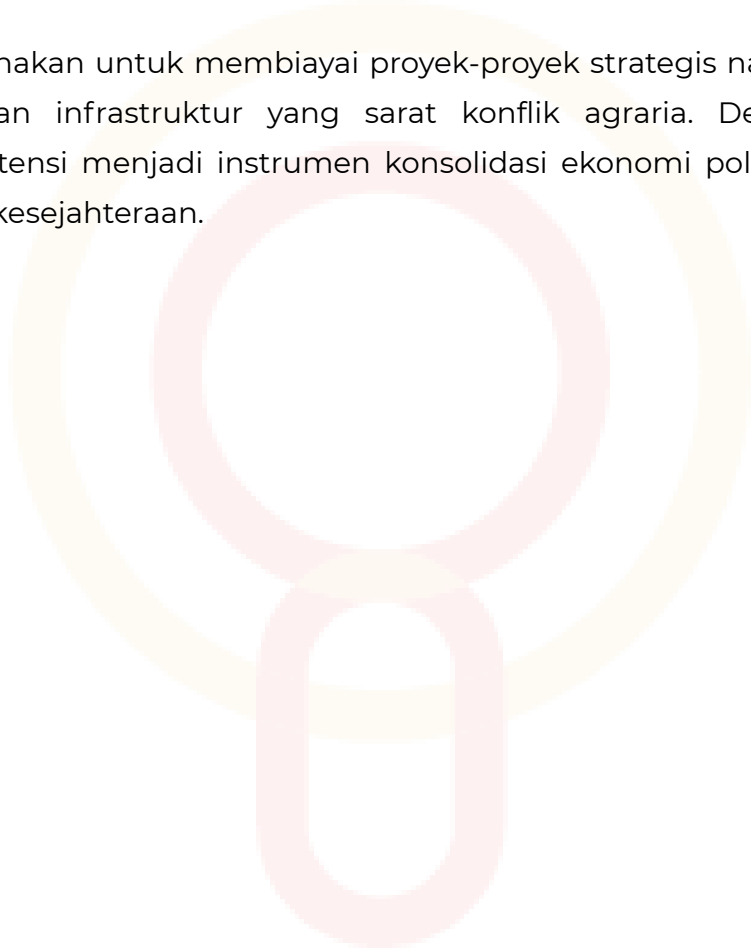
Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas (hanya diatur melalui Perpres No. 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional), program ini juga memperlihatkan pola patronase politik. Dapur MBG di berbagai daerah dikelola oleh relawan dan aparat keamanan, memperkuat pengaruh politik pemerintah hingga ke tingkat komunitas.

Dari perspektif lingkungan, WALHI menghitung bahwa sampah organik dari MBG berpotensi menghasilkan emisi 25.500 hingga 51.000 ton CO₂e per tahun, memperparah krisis iklim.

3. Danantara dan Koperasi Merah Putih: Ekonomi Oligarki Baru

ICW dan YLBHI menyoroti pembentukan badan superholding Danantara, yang menggabungkan 844 BUMN dengan aset mencapai US\$1 triliun, sebagai wujud baru oligarki ekonomi negara. Struktur kepemimpinannya didominasi oleh politisi aktif dan individu dengan afiliasi partai, menimbulkan konflik kepentingan serius.

Program ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional, termasuk sektor energi dan infrastruktur yang sarat konflik agraria. Dengan demikian, Danantara berpotensi menjadi instrumen konsolidasi ekonomi politik rezim, bukan alat pemerataan kesejahteraan.



Kesimpulan dan Refleksi Kritis

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menandai pergeseran signifikan dalam karakter demokrasi Indonesia: dari demokrasi prosedural menuju neoliberalisme otoriter. Pemerintah memperkuat kontrol pusat melalui resentralisasi fiskal, memperluas peran militer dalam ruang sipil, dan mengonsolidasikan oligarki ekonomi melalui program besar seperti MBG dan Danantara.

Ketimpangan sosial meningkat, hak-hak pekerja migran dan perempuan dilemahkan, sementara krisis ekologis diperburuk oleh ekspansi ekstraktivisme. Di sisi lain, pelemahan lembaga pengawasan, politisasi birokrasi, dan kriminalisasi warga memperlihatkan kemunduran demokrasi substantif.

Koalisi Masyarakat Sipil merekomendasikan:

1. Pemulihan supremasi sipil dengan meninjau ulang UU TNI dan menghentikan melibatkan militer dalam urusan sipil.
2. Reformasi fiskal dan desentralisasi yang memberi ruang fiskal lebih luas bagi daerah.
3. Penguatan transparansi anggaran dan akuntabilitas terhadap program MBG dan Danantara.
4. Pemulihan ruang sipil dan perlindungan HAM, termasuk penghentian kriminalisasi warga.
5. Transisi ekologis berkeadilan dengan mengakhiri proyek ekstraktif dan memperkuat ekonomi komunitas berbasis gender dan keberlanjutan.

Refleksi ini menjadi peringatan bahwa demokrasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan hanya dapat dipertahankan jika negara kembali tunduk pada konstitusi, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia Corruption Watch. (2025). Catatan Kritis 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Patronase, Kroniisme, & Kemunduran Pemberantasan Korupsi. Jakarta: ICW.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2025). Catatan Kritis Satu Tahun Pemerintahan Prabowo: Indonesia Gelap. Jakarta: WALHI.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2025). Lanskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian. Jakarta: YLBHI.

Migrant CARE. (2025, Oktober 20). Pekerja Migran Indonesia Makin Menjadi Sapi Perahan di Bawah Pemerintahan Prabowo Subianto: Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan. Diakses dari <https://migrantcare.net/2025/10>

Solidaritas Perempuan. (2025, Oktober 25). Perempuan Berdaulat: Menuntut Kedaulatan Perempuan atas Pangan dan Sumber Agraria yang Berkeadilan Gender. Diakses dari <https://solidaritasperempuan.org>

INFID. (2025). Catatan INFID atas RAPBN 2026. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development.

TENTANG INFID

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

-  **Instagram:** [infid_id](#)
-  **Twitter:** [infid_id](#)
-  **Facebook:** [Infid](#)
-  **Linked In:** [Infid](#)
-  **YouTube:** [INFID TV](#)
-  **Website:** www.infid.org





NGO in Special Consultative Status

with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

.....
Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

